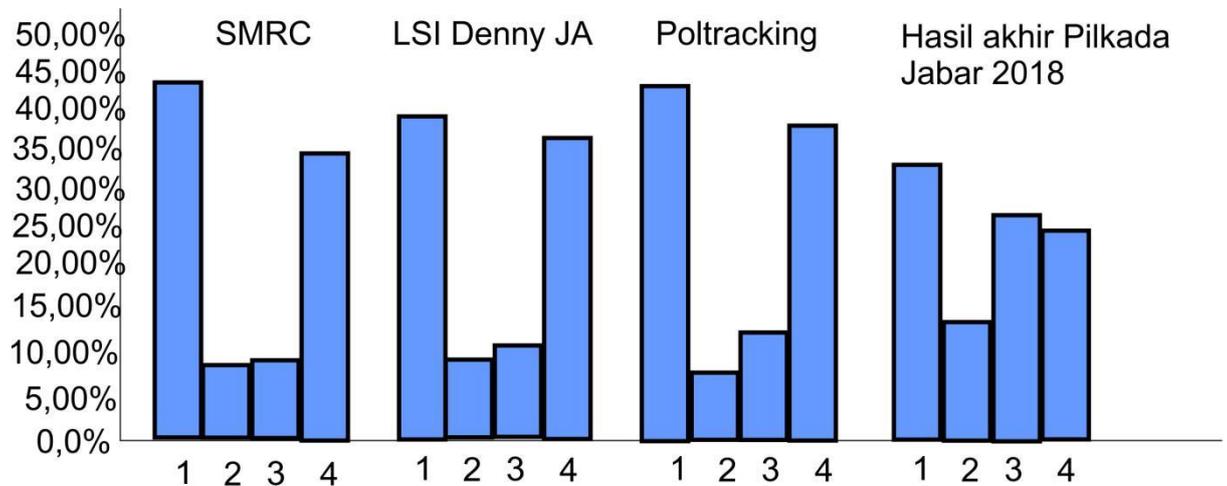


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 lalu meninggalkan beberapa catatan yang realitasnya diluar prediksi dari lembaga survei, prediksi elit politik maupun elektabilitas dari masing-masing pasangan calon. Pasangan – pasangan yang memiliki elektabilitas kuat seperti pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan Pilgub Jawa Barat 2018. Berbagai lembaga survei memprediksikan perolehan suara yang menjadi dua teratas ialah pasangan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum dan Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi, namun hasil dari Pilgub Jawa Barat yang dilaksanakan tanggal 27 Juni tidak selaras dengan prediksi Lembaga survei, terutama pasangan yang digadang menjadi saingan berat Ridwan Kamil realitas suaranya jauh dari prediksi, untuk lebih jelasnya digambarkan dalam grafik berikut:



Keterangan

- 1: Ridwan kamil & Uu Ruzhanul ulum
- 2: Tb Hasanuddin & Anton Charliyan
- 3: Sudrajat & Ahmad Syaikhu
- 4: Deddy Mizwar & Dedi Mulyadi

Gambar I-1 Hasil survei dan Hasil Akhir

Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4104348/finalrekapitulasi-kpu-ridwan-kamil-uu-juara-pilgub-jabar> dan <https://www.merdeka.com/politik/5-hasil-survei-pilgub-jabar-sepanjang-juni-2018.html>

Pola perolehan suara antara empat pasangan calon diatas sangat menarik karena pasangan calon yakni pasangan “Ahmad Syaikhu - Sudrajat” memiliki lonjakan suara saat pemilihan/Hari H memilih, karena pada dari Lembaga survei pasangan Ahmad Syaikhu - Sudrajat ini diprediksikan mendapat suara yang rendah, jauh dibawah pasangan kuat seperti Ridwan kamil dan Deddy Mizwar.

Kasus salah prediksi terjadi juga di Amerika Serikat meskipun negara ini sangat dikenal memiliki tradisi riset opini yang sangat kuat. Salah satu peristiwa bersejarah

dalam kancah riset opini Amerika terjadi saat pemilihan Presiden Amerika tahun 1948. Pemilu saat itu menghadapkan sang petahana (incumbent) Harry S. Truman yang dicalonkan Partai Demokrat dan penantanginya Thomas E. Dewey yang dicalonkan Partai Republik. Truman diprediksi oleh banyak kalangan, termasuk lembaga riset opini, akan kalah oleh Dewey. Bahkan the Chicago Daily Tribune's menulis headline "Dewey Defeats Truman" pada pagi hari menjelang pemilihan Presiden Amerika tahun 1948.⁵ Namun, secara mengejutkan hasil survei opini itu gagal membuktikan prediksinya. Truman menang telak dengan merebut 303 dari 531 electoral votes. Meskipun demikian, kemenangan Truman saat itu cukup tipis bila mengacu pada perolehan suara yang mencapai 49,6% berbanding perolehan Dewey sebesar 45,1%.⁶ (Penelitian Politik.10(1).2013)

Pasangan calon no urut 3 Sudrajat dan Ahmad Syaikhulramani ramai diperbincangkan karena lonjakan suara yang pesat saat hari pemilihan. Strategi yang cukup kontroversial dengan menggunakan fenomena tagar yang ramai diperbincangkan oleh warganet yakni tagar #2019GantiPresiden. Pasangan Ahmad Syaikhulramani - Sudrajat memanfaatkan moment nasional ini sebagai bentuk menarik simpati untuk menaikkan perolehan suara di kontestasi pilkada dan mengindikasikan bahwa pasangan Ahmad Syaikhulramani - Sudrajat ini menghidupkan sentimen anti Jokowi untuk melemahkan elektabilitas Jokowi di pemilu 2019. Pesan yang disampaikan oleh pasangan no 3 pilkada Jawa Barat Sudrajat – Ahmad Syaikhulramani saat debat pemilu yang mendukung perubahan pemerintahan nasional. Namun walaupun beda koridor dikarenakan konteksnya daerah, tapi realitasnya pasangan Ahmad Syaikhulramani - Sudrajat dapat melonjakan suara di kontestasi pilkada, sekaligus mematahkan

prediksi lembaga survei dalam memprediksi elektabilitas dari pasangan calon Pilgub Jawa Barat, khususnya pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat. Berikut lompatan persentase elektabilitas yang di prediksi lembaga survei tiap bulannya terkhusus pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat:

Tabel I-1 Jangka Waktu lembaga survei

Nama Calon	Pasangan	Januari (Indo Barometer)	Februari (Cyrus Network)	Maret (SMRC)	April (LSI)	Mei (Survei Instrat)	Juni (Survei indikator)
Sudrajat Syaikh	- Ahmad	0,9 %	5.0 %	4,6 %	8,2 %	7,7 %	5,3 %

Tabel I-2 Survei Indo Barometer

Survei Indo Barometer

Nama Calon	Pasangan	20-23 Januari	20-26 Maret	7-13 Juni
Sudrajat- Syaikh	Ahmad	0,9 %	5,4 %	6,1 %

Survei yang dilakukan oleh indo Barometer selama 6 bulan, dari bulan januari hingga bulan juni memperoleh hasil yang rendah untuk elektabilitas dari pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat, di awal tahun hanya sebesar 0,9%. Bulan maret ada peningkatan sebesar 4,5% dari bulan maret dan dibulan juni hanya meningkat 0,7%,

seharusnya dari realitas dinamika kampanye yang dilakukan oleh pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat terutama saat debat Pilgub ronde dua terkait insiden menyampaikan dan memunculkan kaos berhastag #2019GantiPresiden, akrobat politik itu sontak membuat suasana gedung menjadi ricuh, namun dengan mengeluarkan pernyataan itu selain meningkatkan elektabilitas dari pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat sendiri juga mengungguh rasa sentimen anti Jokowi yang dimana bentuk harfiah dari gerakan hastag #2019GantiPresiden. Pilgub Jawa Barat menjadi menarik karena munculnya konteks politik nasional yang dimunculkan saat debat ronde ke dua, pemanfaatan fenomena tagar oleh pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat ini menjadi strategi kampanye yang memang mengharapkan dampak yang berkelanjutan dan luas karena selain memenangkan pilkada di Jawa Barat juga memenangkan pemilu nasional.

Seperti kita ketahui Jawa Barat merupakan kantong suara terkuat anti Jokowi, terakhir hasil survei dari SMRC berdasarkan exit poll dari pilkada 2018, elektabilitas dari Jokowi belum mencapai mayoritas di Jawa Barat meskipun pasangan yang diusung Gerindra, PKS, dan PAN, yakni Sudrajat-Ahmad Syaikh tidak menang di Pilkada Jawa Barat, mesin partai yang bekerja berhasil memobilisasi pendukung mereka untuk mengampanyekan sentimen anti-Jokowi. Hal itu terbukti dari survei awal Sudrajat-Syaikh yang hanya belasan persen, namun berubah pada hari pemilihan. Mereka berhasil meraup suara sebesar 28,74 persen. Gerakan 212 saat pemilihan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu juga mempengaruhi mobilisasi suara di Jawa Barat, dan faktor kedekatan wilayah

Jakarta dengan Jawa barat bagian barat seperti Depok, Bogor, Bekasi, sukabumi dan pasangan Ahmad Syaikhu - Sudrajat menang di wilayah tersebut.

Memaknai hasil mobilisasi suara dari pihak oposisi pemerintah atau pihak-pihak yang mengusung pasangan Ahmad Syaikhu - Sudrajat di Jabar yang sekaligus mengusung Prabowo di politik nasional, bentuk dari mobilisasi suaranya dari berbagai isu, salah satunya isu agama yang selalu menjadi “sensitif” terutama saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu yang sangat ramai diperbincangkan dengan memanfaatkan politik identitas dari calon pasangan. Berbicara tentang politik identitas untuk masyarakat plural seperti Indonesia, kita akan dihadapkan secara terus menerus dengan ledakan pluralism dari luar dalam satu tarikan nafas. Akan didapati Indonesia sebagai Negara tetapi tidak memiliki satu tradisi multikulturalisme, atau setidaknya pada abad-abad terakhir, orang kepulauan dan sebagainya mengalami kekuatan multikulturalisme, dan yang ada adalah plural monokulturalisme, yang kemudian mengandung bibit persoalan ketika ada ledakan- ledakan pluralism dari luar. (Widya & Haloman,2009:32)

Menurut Lukmantoro (2008:2) Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. (Budiardjo, 2015: 74) Perbedaan politik identitas di Indonesia menjadi penting untuk dikaji sebagai upaya menarik benang merah dari perbedaan yang ada sehingga stabilitas politik tetap terjaga. Sebagai negara yang dilatarbelakangi oleh berbagai keanekaragaman, Indonesia telah membuktikan dari zaman kemerdekaan hingga saat ini kesatuan dapat dipelihara.

Uraian mengenai politik identitas tidak terlepas dari makna identitas itu sendiri. Suparlan (2004: 25) mengartikan identitas atau jati diri sebagai pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu.

Mobilisasi suara dengan memanfaatkan politik identitas mendapat hasil yang cukup bagus, walaupun pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat tidak menang di kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018 ini, tapi lonjakan suaranya sangat lah tinggi, sebelumnya yang hanya diprediksi oleh lembaga survei tidak lebih dari 10% nyatanya saat hasil Pilkada pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat memperoleh suara sebesar 28,74% dan pemanfaatan fenomena tagar dengan memainkan isu pun terbilang cukup efektif dalam strategi kampanye pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat ini.

Dalam masyarakat dengan berbagai kebudayaan yang beragam, sehingga karena perbedaan kebudayaan inilah muncul istilah politik identitas atau politik perbedaan, yang berarti politik identitas adalah sebuah orientasi yang mengarah ke penteorian sosial dan politik , dengan bentuk politik identitas yang beragam karena identitas terdiri dari beberapa prinsip diantaranya sebagai berikut: (Heywood: 2014: 279)

- Ras dan etnisitas
- Gender
- Agama
- Kebudayaan

Fenomena di Pilgub Jawa Barat yang menarik partisipan dengan cara memobilisasi dengan isu politik nasional atau ganti presiden, dan karena isu ganti presiden ini cukup ramai dibicarakan dan tentunya menjadi sebuah gerakan yang saat itu dimanfaatkan oleh pihak oposisi. Kemudian setelah ramai dengan isu ganti presiden ini akhirnya muncu juga isu keagamaan yakni isu Jokowi anti islam.

Kebangkitan keagamaan menjadi salah satu konsekuensi dari kebangkitan yang lebih besar dalam politik identitas, agama menjadi sebuah penggerak yang krusial untuk mengunggah kembali identitas personal dan sosial, selain itu, agama juga membangkitkan rasa solidaritas yang kuat dengan menghubungkan antar personal sehingga terjadinya rasa senasib sepenanggungan yang dibawa dengan visi yang sudah seframe antar personal (Heywood, 2014: 287)

Dibalik kebangkitan keagamaan, didukung juga dengan elit agama. Elit agama di daerah sangat berperan dalam aktivitas politik local. Para elite agama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jama'ah, pengetahuan agama dan charisma, yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah. Seringkali dalam sebuah pilkada, para calon bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren atau ke rumah-rumah kiai untuk meminta doa dan restu politik. Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh elite agama terhadap masyarakat sangat besar. (Halim,2014:147)

Politik identitas jika kita lebih menelisik dari sisi negatifnya, bagaimana politik identitas ini mempengaruhi perilaku pemilih, dan dari sini dapat dilihat bahwa pemilih akan memilih pasangan calon dari identitasnya, tidak dilihat secara

rasionalitasnya seperti kinerja, programnya, visi misinya dsb karena pemilu dalam terminologi demokrasi yang sejatinya berbasis pada rasionalitas

Fenomena tagar, fenomena 212 memang memiliki banyak faktor tapi jika dilihat dari sisi positifnya fenomena-fenomena ini mampu mengunggah partisipasi politik dari masyarakat. Jika dilihat dari politik identitas bagaimana isu-isu agama sering dijadikan bahasan yang cukup sensitif sehingga terjadilah pergerakan-pergerakan oleh masyarakat yang tertarik akan hal itu, secara tidak langsung masyarakat turut menyuarakan aspirasinya, sehingga partisipasi politik juga meningkat. Dilihat dari konteks budaya politik dimana budaya politik yang baik ialah budaya yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kehidupan secara politik. Di era reformasi, partisipasi politik merupakan sebuah keharusan yang dibuka lebar-lebar dan telah menjadi tuntutan dari masyarakat itu sendiri, apalagi dalam suatu negara demokrasi, bentuk pemerintah dibangun dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan kata lain, keterlibatan dan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam membangun sudah mutlak keberadaannya. Karena budaya politik membicarakan konteks sikap, perilaku atau tindakan seseorang terhadap politik maka fenomena sosial seperti tagar dan gerakan 212 sangat berkaitan dengan budaya politik. (Heywood, 2014: 300)

Budaya politik dimana masyarakat dengan sentimen politik identitas dalam konteks agama memang cukup diuntungkan karena menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan wiraswasta Islam dan menurut C. Geertz, di Indonesia terdapat budaya politik priyayi, santri dan abangan. Oleh karena itu isu keagamaan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai elit

politik yang memiliki kepentingan yakni mengunggah sentimen anti Jokowi dengan berbagai faktor salah satunya faktor keagamaan dengan konteks budaya politik yang berkembang di Indonesia. (Subair, Jurnal Dialektika 9, 2015: 34-46)

Budaya politik cenderung kearah sebagai sikap dan perilaku politik individu maupun kelompok sehingga budaya politik mempunyai refleksi terhadap kelembagaan politik hingga proses politik, secara tidak langsung yang mendasari sistem politik yang ada di Indonesia ialah budaya politik di Jawa Barat, isu mengenai politik identitas hampir berasal dari sentimen agama. Di kalangan muslim, berangkat dari kebijakan publik politik lokal yang terlahir dari aspirasi yang melahirkan peraturan daerah, yang oleh sebagian orang menyebutnya sebagai "Perda Syariah", di jalur lain, lahir pula beberapa kelompok massa yang berbasis agama Islam yang memperjuangkan aspirasinya dengan aksi-aksi di jalanan. Kelompok-kelompok seperti FPI, MMI dan FUI, seringkali turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasi yang dibawa oleh kelompok tersebut, berkaitan dengan fenomena tersebut Jawa Barat menjadi sorotan dikarenakan, secara historis, Jawa Barat ini memiliki catatan sendiri soal kelompok "Islam Keras" salah satu momen historis sebelum orde baru adalah pemberontakan DI/TII 1950an (Subair, Jurnal Dialektika 9, 2015: 34-46)

Jawa Barat dengan politik identitas yang kuat, latar belakang secara historis kelompok "Islam Keras" ini sangat rawan sekali dengan sentimennya terhadap agama. Latar belakang dari masyarakat Jawa Barat sendiri yang bisa di manfaatkan oleh calon pasangan yang diusung oleh partai politik dengan latar belakang Islam dan mengeluarkan isu yang memang sedang hangat dibicarakan oleh nasional, dalam arti isu nasional yang dibawa oleh calon pasangan lokal sebagai isu utama

dalam dinamika pilkada Jawa Barat. Selain itu secara geografis wilayah Jawa Barat yang berdekatan langsung DKI Jakarta yang saat Pilkada kemarin menggunakan isu agama sebagai strategi pemenangan pasangan Anis-Sandi, yang dimana saat itu terlahir gerakan 212 sebagai gerakan terbesar yang digerakkan diatas kepentingan agama dengan bermuatan politik.

Melihat fenomena yang menarik tersebut, skripsi ini berupaya memperoleh pemahaman lebih lanjut. Skripsi ini juga terfokus pada pembuktian lonjakan suara Ahmad Syaikh - Sudrajat dalam pilgub Jawa Barat, dengan mengandalkan sentimen anti Jokowi dan isu pergantian presiden sebagai materi utama kampanyenya.

1.2 Rumusan masalah

Berbagai faktor yang melibatkan dua variabel antara budaya politik dan politik identitas yang ditunjukkan dengan bagaimana masyarakat khususnya Jawa Barat menjadi objek pemenangan dengan digugah sentimen anti Jokowi , sehingga dengan itu terlahirlah rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah kampanye #2019gantipresiden turut mempengaruhi dalam perolehan lompatan hasil suara Ahmad Syaikh - Sudrajat? Apa faktor sosial politik yang menjelaskan lompatan suara pasangan Ahmad Syaikh - Sudrajat ?

1.3 Tujuan penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap akademik maupun dinamika politik tertentu dan tujuan diadakan penelitiannya ini untuk mengetahui lebih dalam fenomena yang terjadi di pilkada Jawa Barat lalu, terkhusus pasangan Sudrajat-Syaikhu yang mengunggah sentiment anti Jokowi di Jawa Barat, selain itu penelitian ini juga membahas strategi yang digunakan oleh pasangan Ahmad Syaikhu - Sudrajat sehingga bisa memperoleh suara diluar prediksi Lembaga survei.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbgai menjadi dua yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara parktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan tentang politik identitas dengan budaya politik yang mempengaruhi sentimen primordial dari masyarakat Jawa Barat

1.4.2 Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian serta mengembangkan khasnah ilmu pengetahuan.

1.5 Kerangka teori

1.5.1 Politik Identitas Pemilu

1.5.1.1 Politik identitas

Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan jawaban terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara rasional, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kelompok- kelompok masyarakat yang mengalami pemutusan dengan struktur sosial. Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapatkan hambatan yang sangat bermakna. (Lukmantoro, 2008: 2)

Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk tekanan yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi berbagai kelompok yang memang ditujukan untuk perubahan (Bagir, 2011: 18).

Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini, namun justru mulai tampak penguasaan identitas-identitas sektarian baik dalam agama, suku, daerah dan lain-

lain. Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (citizenship) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain (Bagir, 2011: 17)

Menegenai perkembangan politik identitas yang berkembang ilmuwan politik lain yaitu Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa politik identitas munculnya kelompok-kelompok atau komunitas yang ada di masyarakat dan mereka mendefinisikan diri mereka kedalam satu kesatuan agama, suku, ras, dan nilai-nilai kultural yang dimiliki secara bersamaan (Huntington, 1992:139). Yang tak kalah penting disoroti oleh Huntington dari gerakan politik identitas tersebut adalah masing-masing komunitas ataupun kelompok sosial yang ada merasa paling memahami akan suatu realitas. Kejadian dari suatu realitas sosial dinilai dari stereotif kelompok mereka dan mereka beranggapan paling mampu untuk mengatasi kejadian dari realitas tersebut. Sedangkan dari pihak komunitas ataupun kelompok sosial yang lain juga berfikir akan tindakan yang demikian sehingga memunculkan apa yang disebut oleh Huntington sebagai benturan antar peradaban. Huntington juga memprediksikan wajah dunia kedepanya sangat dipengaruhi oleh gerakan politik identitas seperti ini dan benturan-benturan sosial yang terjadi dimasyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut dikarenakan masing-masing kelompok sosial yang ada berusaha mempertahankan eksistensi budaya mereka terhadap kemunculan kebudayaan baru.

Muhammad Habibi, ahli politik dari Universitas Mulawarman, Samarinda menjelaskan, “Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat, sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuan Politik Internasional di Wina pada 1994. (Filsafat dan teologi islam. 10(1).2019)

Pertemuan tersebut menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktek politik dan menjadikannya sebagai kajian dalam bidang ilmu politik. Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (grand narrative), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (freedom), toleransi dan kebebasan bermain (free play), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (race thinking), biofeminisme dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk baru intoleransi, praktek-praktek kekerasan pun muncul. (Filsafat dan teologi islam. 10(1).2019)

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari sense (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas. Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar

persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (categories of difference) (Setyaningrum, 2005: 26).

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang.

Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

1. Primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.
2. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
3. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 14-15).

Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, salah satunya yang terjadi dalam serial film Upin dan Ipin. Masing-masing individu yang memiliki identitas pribadi yang berbeda dari suku, etnis dan agama telah bergabung menjadi satu komunitas yang memiliki identitas kolektif.

Walaupun mereka memiliki identitas kolektif sebagai warga negara Malaysia yang sah, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tetap memiliki ego untuk memperjuangkan identitas pribadinya. Disinilah terjadi persaingan antar individu dalam suatu komunitas yang ada dalam film Upin dan Ipin ini. Hal ini disebut sebagai politik identitas. Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituen (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian. Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan

persaingan untuk melenggengkan kekuasaan, sehingga politik identitas ini sangat membawa pengaruh besar di pemilu

Politik identitas menjadi variabel yang sangat berpengaruh di pemilu, karena kondisi masyarakat yang memang sangat sensitif sekali soal isu SARA dan juga mayoritas pemilih di Indonesia memang belum rasional atau dalam memilih masih mendepankan identitas dari pasangan calon daripada rasional program kerja visi misi dsb. Politik identitas merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan masa-masa lalu dengan masa-masa sekarang sehingga perpolitikan masa sekarang merupakan cerminan dari perpolitikan masa lalu yang memang tidak adanya perkembangan dari kebudayaan yang melekat di masyarakat Indonesia

1.5.1.2 Pemilu

Pemilu di Indonesia beberapa tahun kebelakang menjadi tidak rasional dengan adanya politik identitas ini karena menyangkut sebuah kepercayaan, kesamaan, sehingga terlahir perbedaan yang menjadi titik dalam ketidakrasional pemilu sendiri. Masyarakat sendiri menjadi ragu jika penggiringan opini berdasarkan politik identitas dengan berbagai pendekatan, disini berarti pemilu di Indonesia masih belum ideal karena pragmatisme politik demi kemenangan semata, tanpa memikirkan pengaruhnya dalam tatanan sosial yang nantinya bisa saja merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pemilu sebagai bagian integral dari demokrasi memiliki fungsi sebagai sarana yang digunakan untuk memilih tokoh atau calon pejabat publik. Dalam penyelenggaraannya Pemilu ini sendiri sering terjadi pelanggaran asas-asas yang

terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk pelanggarannya adalah pemaksaan untuk memilih suatu pasangan dalam kontestasi politik karena kesamaan identitas. Dari faktor tersebut memunculkan gerakan sosial yang bertujuan menyerang calon kontestan pilkada lain berdasarkan paham keidentitasan.

Dari permasalahan yang ada ini juga memungkinkan berdampak pada adanya konflik horisontal antara sesama warga masyarakat. Hal tersebut apabila tidak bisa dikelola secara baik tentu akan membahayakan keamanan dan ketertiban di kehidupan bersama di masyarakat.

Pemilu di Indonesia terutama nanti di tahun 2019 akan diwarnai dengan politik identitas sehingga berdampak ke politik SARA yang seharusnya politik SARA telah diatur dalam perundang-undangan, bahkan dilarang keras mengskreditkan lawan politik dengan menggunakan politik SARA, dalam konteks ini penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu memiliki tugas lebih, untuk menjaga agar keberjalan pemilu jauh dari politik SARA. Karena hal sensitif ini lah yang dapat mengganggu ke stabilan negara. (Suara merdeka, 2018: 7)

1.5.1.3 Perilaku Pemilih

Pelaksanaan demokrasi dapat dilihat melalui penggunaan hak pilih universal dalam pemilu, dimana setiap warga negara yang memenuhi persyaratan berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh C.B Macpherson (1973) bahwa "One of the central value of our democratic theory has been the surpassing importance of freedom and choice". Perilaku memilih menjadi kajian menarik, karena berbagai faktor turut mempengaruhi pemilih dalam

menentukan pilihannya. Faktor tersebut diantaranya seperti faktor kedaerahan / daerah asal calon, identifikasi kepartaian / kedekatan pemilih dengan partai pengusung calon, dan program-program pasangan calon yang dianggap akan memberikan keuntungan bagi mereka jika si calon terpilih, dan faktor agama. Meyer (2004) mengatakan bahwa kebudayaan berbasis agama dipengaruhi praktik kebiasaan beragama.

Secara teoritis, perilaku pemilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, masing-masing pendekatan sosiologi, psikologi, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologi, pendekatan ini lahir dari buah penelitian Sosiolog, Paul F. Lazarsfeld dan rekan sekerjanya Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dari Columbia University. Karenanya model ini juga disebut Mazhab Columbia (Columbia School). (Dieter Roth, 2008).

Menurut teori ini, setiap manusia terikat didalam berbagai lingkaran sosial, setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, contohnya keluarga, lingkaran rekan-rekan, tempat kerja dsb. Lazarsfeld menerapkan cara pikir ini kepada pemilih. Seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu: status ekonominya, agamanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya dan usianya mendefinisikan lingkaran sosial yang mempengaruhi keputusan sang pemilih. Setiap lingkaran sosial memiliki normanya sendiri, kepatuhan terhadap norma-norma tersebut menghasilkan integrasi.

Namun konteks ini turut mengontrol perilaku individu dengan cara memberikan tekanan agar sang individu menyesuaikan diri, sebab pada dasarnya setiap orang

ingin hidup dengan tentram, tanpa bersitegang dengan lingkungan sosialnya. (Dieter Roth, 2008).

Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya *Kuasa Rakyat* (2012), menjelaskan bahwa faktor agama menjadi hal yang dipercaya sangat berpengaruh dalam konteks pendekatan sosiologis. Selain pendekatan Sosiologis, pendekatan Psikologis juga bisa digunakan dalam menganalisa perilaku pemilih dalam pemilihan kepala desa. Meski begitu, pendekatan ini tidak dominan dibanding pendekatan Sosiologis.

Dalam bukunya, Dieter Roth (2012) menjelaskan bahwa pendekatan sosial psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilu jangka pendek atau keputusan yang diambil dalam waktu yang singkat. Hal ini berusaha dijelaskan melalui trias determinan, yakni identifikasi partai, orientasi kandidat dan orientasi isu/utama. Inti dasar pemikiran ini dituangkan dalam bentuk sebuah variabel yakni identifikasi partai (*party identification*).

Dalam pendekatan yang sama, Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi dalam bukunya *Kuasa Rakyat* (2012) menjelaskan bahwa seorang warga berpartisipasi dalam Pemilu atau Pilpres bukan saja karena kondisinya lebih baik secara sosial ekonomi, atau karena berada dalam jaringan sosial, akan tetapi karena ia tertarik dengan politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai), punya cukup informasi untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti,

serta percaya bahwa pilihannya dapat ikut memperbaiki keadaan (political efficacy).

Joko J. Prihatmoko (2005 ; 46) menjelaskan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik. Di samping itu, pemilih merupakan bagian masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok. Terdapat kelompok masyarakat yang memang non-partisan, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka „menunggu“ sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Prof. Miriam Budiarjo (2008;136) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau (lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau

salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. Perilaku memilih bisa dikategorikan ke dalam dua besaran, yaitu:

1. Perilaku Memilih Rasional Perilaku memilih ini, notabane disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih. Sehingga pemilih, disini berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat mana pun. Dan sebagian besar mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu.

2. Perilaku Memilih Emosional

Sementara untuk perilaku memilih ini, lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Seperti factor sosiologis, struktursosial, ekologi maupun sosiopsikologi. Perilaku pemilih dan partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan (1990;127). Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan- sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Sementara itu menurut Surbakti perilaku pemilih adalah aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaiatan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih didalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. (1997;105)

1.5.2 Sentimen Primordialis

Di Indonesia, penguatan sentimen primordial yang kemudian memicu sentimen kedaerahan atau kelokalan dan kesadaran politik baru di era demokratisasi, telah dimulai dari Indonesia memasuki fase reformasi. Dalam format identitas, sentimen primordial terceminkan mulai dari upaya pemasukan nilai-nilai primordial ke dalam peraturan daerah. Sementara dalam konteks keagamaan, sentimen primordialisme terefleksikan, misalnya dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan contohnya “perda syariah” di beberapa daerah yang menjadi kota identik dengan agama tertentu.

Tumbuhnya sentimen primordial di Indonesia telah menjadi poin tersendiri di era demokratisasi terkait ini, Baladas Ghosal menyatakan bahwa demokratisasi di Indonesia seperti fenomena kotak Pandora yang terbuka, namun fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia, fenomena ini juga sering terjadi di negara yang memiliki multi etnis (Ghosal, 2004: 506). Dalam konteks transisi menuju demokrasi, secara teoritis terdapat beberapa sudut pandang yang menjelaskan fenomena bangkitnya identitas primordial, pada umumnya kebangkitan sentimen primordial dilihat sebagai gejala yang dimana tidak terakomodirnya keterwakilan kelompok masyarakat tertentu, baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Disisi lain, fenomena juga dipicu oleh menguatnya rasa ketidakpastian akibat perubahan pemerintah yang berkuasa, sebagaimana yang diyakini oleh Ranksin dan Goonawerdana, yaitu turut bertanggung jawab atas meluasnya kesenjangan ekonomi dan politik serta budaya.

Primordialisme dalam masyarakat terbentuk melalui proses sejarah, dan juga melalui sosiologis, sehingga itu menguat dalam asumsi masyarakat, seperti halnya dengan kepresidenan, karena faktor suku menjadi bagian yang diyakini karena suku tersebut dianggap lebih dulu atau lebih banyak dimasyarakat, sehingga diluar suku tersebut merasa termarginalkan. Budaya primordialisme dalam masyarakat terbentuk melalui kebiasaan persepsi masyarakat tentang kepemimpinan (Syihabudin, skripsi, 2017: 40)

Bangkitnya sentimen identitas keagamaan dalam beragam ekspresinya, termasuk hadirnya kelompok-kelompok islam, di indonesia tepatnya pasca soeharto menjabat munculnya fenomena kesadaran dan gerakan politik yang menunjukkan sikap krisis terhadap ke indonesiaan

Membicarakan kebangkitan sentimen primordial khususnya keagamaan dalam elemen-elemen negara dan bangsa tidak dapat dipisahkan dari persoalan interpretasi nilai-nilai keagamaan pengselarasan faktor ideologis dengan ketertaikan terutama seberapa jauh penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara dan berbangsa seharusnya diwujudkan, menjadi penting karena merupakan salah satu penopang keyakinan menegakan nilai-nilai agama yang komperhensif. (Anwar, 1995: 143). Interpretasi agama semacam itu sejalan dengan tipologi pertama dari tiga tipologi pemikiran Munawir Sjadzali, yakni pertama, kelompok yang menyatakan bahwa islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk mengatur negara. Kedua, aliran yang menganggap bahwa islam tidak mengurus urusan bernegara. Ketiga, aliran jalan tengah, yang selain menolak bahwa islam negara yang sempurna atau negara yang

serba lengkap dan bahwa agama islam memiliki sistem bernegaraan aliran ini juga menolak yang dimana islam menurut persepsi barat yang hanya mengatur urusan hamba dengan tuhan nya saja. Aliran ini meyakini bahwa agama islam tidak memiliki sistem yang mengatur dalam bernegara namun Islam mengatur seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara

1.5.2.1 Sentimen Politik Sebagai Strategi Kampanye Pemilu

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima dikalangan ilmuwan komunikasi Jadi pada dasarnya kampanye merupakan hal

lumrah yang sering ditemukan. Bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama.

Kampanye politik memang menjadi hal yang harus menarik karena berkaitan dengan suara dari calon pasangan tertentu, dengan berbagai cara yang tentunya menjadi PR sendiri untuk tim sukses dari pasangan calon, namun dengan menggunakan politik identitas menjadi kampanye yang memang dapat menjaring suara yang cukup efektif, namun penggunaan politik identitas yang mengarah ke politik SARA tidak boleh dilakukan, oleh karena itu banyak pasangan calon mengemasnya dengan sesuatu hal yang mengungguh sentimen dari masyarakat atau target suara terhadap suatu isu

1.5.3 Budaya Politik dan Konteks Sosial Masyarakat Pemilih

Budaya politik terdapat banyak variasi konsep, tokoh yang merintis pengembangan teori budaya politik salah satunya adalah Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melalui buku *The Civic Culture* (1963) yang didasarkan pada survei mengenai sikap penduduk di lima negara yaitu Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Italia, dan Meksiko. Istilah budaya politik mengacu pada orientasi politik pada sistem politik di negara tersebut. Pengertian budaya politik memang memiliki banyak interpretasi, misalnya sarjana Indonesia bernama Amin Ibrahim mengatakan budaya politik adalah cipta-rasa-karya-karsa dalam berpolitik yang mewarnai sistem perpolitikan di negara tersebut. Kualitasnya sangat tergantung dengan berbagai faktor seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi serta faktor lingkungan.

Sementara menurut Rusadi Sumintapura yang berpendapat bahwa budaya politik merupakan tingkah laku individu dan orientasinya terhadap sistem politik yang dihayati oleh anggotanya. (Faulk, 2010: 177)

Menurut Almond dan Verba sebagaimana dikutip Chilcote(2007:302), budaya politik merupakan orientasi politik dan sikap-sikap yang dipegang individu-individu dalam berhubungan dengan sistem politik mereka, yang kemudian menjadi agregat pada tingkat kolektif. Pye sebagaimana dikutip Chilcote (2007:299) menyatakan bahwa budaya politik merupakan metode kerja dari hal-hal terpendam psikologi individual yang kompleks hingga ke tingkat agregat sosial. Pye membedakan budaya politik pada tingkat individu sebagai kontrol perilaku politik yang efektif, dan tingkat kolektif sebagai struktur sistematis nilai-nilai dan pertimbangan rasional yang memastikan koherensi kinerja intstitusi-institusi dan organisasi-organisasi. (Politika.

Budaya politik yang dibahas oleh beberapa pendapat diatas dapat ditarik sebagai pemahaman konsep yang memadukan dua variabel yaitu sistem dan individu. Dengan pemahaman ini konsep individual tidak berarti bahwa dalam pemahaman sistem politiknya kita berasumsi masyarakat yang akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik sebagai pengakuan adanya pandangan tersebut (Efriza, 2012: 94)

Budaya politik sebagai salah satu bagian kebudayaan merupakan satu di antara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem

politik. Dalam Budaya (kultur) politik itu berinteraksi sejumlah sistem (sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem ekologi) yang tergolong dalam kategori lingkungan dalam-masyarakat (intra-societal environment) ataupun lingkungan luar-masyarakat (extra-societal environment) sebagai hasil kontak sistem politik dengan dunia luar.

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Menurut Samuel H. Beer dan Adam B. Ulam serta Gilbert Abcarian dan George S. Masannat, umumnya dianggap dalam sistem politik terdapat empat variabel, yaitu : (1) kekuasaan – sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat; (2) kepentingan – tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik; (3) kebijakan – hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan; serta (4) budaya politik – orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Jadi, menurut mereka, budaya politik merupakan salah satu variabel dari sistem politik. (Beer dan Ulam, 1967: 25-31)

Hakikat dan ciri-ciri dari budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan sehingga nilai-nilai yang dimaksud ini berhubungan dengan tujuan. Mardiono berpendapat ada enam masalah pokok yang berkaitan dengan budaya politik yaitu:

1. Sosialisasi, internalisasi, serta institusionalisasi.
2. Persepsi tentang kekuasaan
3. Posisi agama-agama dan kebudayaan daerah.
4. Integrasi antar elit politik
5. Integrasi elit-elit massa
6. Masalah pemerataan dan keadilan

Menurut Trubus Rahardiansyah P, budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khusus, pengertian budaya politik meliputi legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintahan, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejala masyarakat terhadap kekuasaan, kegiatan politik juga meliputi keagamaan, ekonomi, dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas.

Budaya politik mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yakni cipta-rasa-karsa-karya di bidang politik. Ini berarti mencakup hal-hal yang bersifat abstrak sekaligus konkrit. Dalam kenyataan politik praktis, budaya politik itu terutama menonjol dalam etika dan perilaku para aktor politik baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan dari semua stratifikasi sosial yang ada.

1.5.3.1 Ruang lingkup Budaya Politik

Berdasarkan ruang lingkungnya, budaya politik mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Orientasi yang dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan dan penolakan terhadap kehidupan politik

- b) Orientasi yang bersifat menilai objek dan peristiwa politik
- c) Orientasi dari individu yang diperolehnya dari pengetahuan mengenai kehidupan politik.

1.5.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik

Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi lima adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan warga negara.

Semakin tinggi tingkat pendidikan warga negara, semakin banyak pengetahuan politik yang diterima, hal ini memungkinkan lahirnya budaya politik yang demokratis

- b. Tingkat Ekonomi

Semakin tinggi kesejahteraan suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya

- c. Kamauan politik (political will)

Kemauan pemegang kekuasaan untuk memperbaiki sistem politik

- d. Supremasi hukum

Penegakan hukum yang adil dan independen akan melahirkan budaya politik yang taat hukum

e. Media massa yang independen

Media massa merupakan alat yang efektif dalam rangka menumbuhkan budaya politik yang sehat dan santun

1.5.3.3 Dampak Budaya Politik Dalam Suatu Sistem Politik

Suatu sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinannya dalam suatu sistem politik yang mengambil penekanan pada suatu tipe budaya politik tertentu akan berdampak pada suasana sistem politik yang bersangkutan.

1. Dampak dari Budaya Politik Kaula

Oleh karena budaya politik kaula memposisikan individu atau kelompok dalam keadaan pasif sehingga apatis, maka partisipasi mereka kepada pengembangan kehidupan politik suatu pemerintahan/institusi dalam suatu sistem politik rendah. Pada gilirannya lembaga tidak dapat memanfaatkan potensi mereka untuk peningkatan lembaga dan kesejahteraan umum/bersama. Pada sisi lain, budaya politik kaula dapat membentuk kepemimpinan korup, otoriter, despotis.

2. Dampak dari Budaya Politik Parokial

Oleh karena budaya politik parokial memposisikan individu atau kelompok dalam lingkup kedaerahan yang sempit, maka partisipasi mereka kepada pengembangan kehidupan politik suatu pemerintahan/institusi dalam suatu

sistem politik terkotak-kotak berdasarkan asal daerahnya masing-masing. Pada gilirannya partisipasi individu atau kelompok terhadap pengembangan kehidupan politik suatu pemerintahan/institusi dalam suatu sistem politik rendah dan kesejahteraan tidak merata. Dalam konteks negara dapat muncul paham tribalisme.

3.Dampak dari Budaya Politik Primordial

Oleh karena budaya politik primordial memposisikan individu atau kelompok pada pilihan pertemanan atau perhimpunan yang sempit untuk memuluskan kepentingannya dalam suatu sistem politik, maka kontribusi atau partisipasi individu atau kelompok terhadap pengembangan kehidupan politik suatu pemerintahan/institusi dalam suatu sistem politik terbatas. Individu-individu atau kelompok-kelompok terfragmentasi ke dalam kepentingan-kepentingan yang dapat saja menghambat atau bahkan anti kemajuan suatu pemerintahan/institusi dalam suatu sistem politik di mana mereka berada.

4.Dampak dari Budaya Politik Partisipan

Oleh karena budaya politik partisipan memposisikan individu atau kelompok sebagai anggota aktif dari suatu pemerintahan/institusi dalam suatu sistem politik, maka kontribusi atau partisipasi individu atau kelompok terhadap pengembangan kehidupan politik suatu pemerintahan/institusi dalam suatu sistem politik tinggi. Oleh karena kepemimpinan memperhatikan prinsip-prinsip persamaan, kebebasan,

partisipasi, transparansi, toleransi, dan akuntabilitas publik dari demokrasi, maka dapat mendorong partisipasi aktif dalam suasana demokratis dari segenap warga yang pada gilirannya lembaga bisa memetik kemajuan kehidupan politik dalam suatu sistem politik yang signifikan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menghubungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010:5) Sedangkan menurut Sugiyono (2011:18) *Mix Methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan diperoleh data lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif

1.6.1 Kuantitatif

Pendekatan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jawaban dari masyarakat apakah proses memilih pasangan Ahmad Syaikh dan Sudrajat disebabkan oleh kampanye anti Jokowi/Tagar #2019GantiPresiden

1.6.1.1 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang perlu diuji kebenarannya, H_0 artinya tidak ada hubungan antar variable yang diteliti, sedangkan H_a artinya ada/terdapat hubungan antar variable yang diteliti.

H₀₁ : Tidak ada hubungan antara Tagar #2019GantiPresiden (X1) dengan pilihan masyarakat (Y)

H₀₂ : Tidak ada hubungan perilaku pemilih (X2) terhadap pilihan masyarakat (Y)

H₀₃ : Tidak ada hubungan antara Tagar #2019GantiPresiden (X1) dan perilaku pemilih (X2) dengan pilihan masyarakat (Y)

H_{a1} : Ada hubungan antara Tagar #2019GantiPresiden (X1) dengan Pilihan masyarakat (Y)

H_{a2} : Ada hubungan perilaku pemilih (X2) dengan pilihan masyarakat (Y)

H_{a3} : Ada hubungan antara Tagar #2019GantiPresiden (X1) dan perilaku pemilih (X2) dengan pilihan masyarakat (Y)

1.6.1.2 Definisi Konseptual

Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antesenden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas (X). Variabel ini memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013: 39). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39).

. Variabel bebas penelitian ini adalah Tagar #2019GantiPresiden (X1) dan Perilaku Pemilih (X2) , sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah pilihan masyarakat (Y). Variabel Tagar #2019GantiPresiden digunakan untuk melihat bagaimana tagar didalam masyarakat yang kaitannya dengan diadakannya pilkada Jawa Barat 2018. Variabel Perilaku pemilih digunakan untuk melihat bagaimana dasar perilaku pemilih masyarakat untuk menentukan calon gubernur dan wakilnya pada Pilkada Jawa Barat 2018 Variabel Pilihan masyarakat digunakan untuk melihat bagaimana pilihan masyarakat terbentuk yang dihasilkan dari aktivitas Tagar #2019GantiPresiden dan perilaku pemilihnya.

1.6.1.3 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, tagar #2019GantiPresiden merupakan bentuk kampanye, dimana kampanye menurut rice dan pasley ialah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Maksud tagar #2019GantiPresiden pada penelitian ini antara lain :

a. Bentuk Kampanye

Indikator ini menilai bahwa tagar #2019GantiPresiden merupakan bentuk kampanye yang disuarakan oleh seseorang maupun kelompok orang yang menolak petahana di politik nasional

b. Gerakan Politik

Indikator ini menilai bahwa tagar #2019GantiPresiden merupakan gerakan politik yang dibuat oleh seorang yang oposisi terhadap presiden, dan menyuarakan untuk mengganti presiden dalam pemilu 2019

c. Motif Agama

Indikator ini menilai bahwa tagar #2019GantiPresiden merupakan motif agama, dimana kelompok yang mendukung tagar ini merupakan kelompok dari salah satu basis agama, dan yang menciptakan gerakannya pun merupakan kader dari salah satu partai yang berlandaskan agama

Maksud perilaku pemilih dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi menilai bagaimana dasar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, apakah dari kesamaan agama, etnis, tradisi keluarga, kelas sosial, atau gender.

b. Pendekatan Psikologi

Pendekatan Psikologi menilai bagaimana dasar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, apakah dari kedekatan dengan partai, party ID, persepsi terhadap kandidat, atau orientasi isu isu.

1.6.1.4 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala atau

fenomena sosial yang terjadi di pilkada Jawa Barat 2018 yang dimaksud disini ialah fenomena lonjakan suara pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki

1.6.1.5 Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiono 2008: 118) Prinsip pengambilan sampel adalah representasi dari populasi. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 6.295.486 (Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya) (KPU Jawa Barat 2018). Perhitungan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus Frank Lynch (Sugiarto,2001:60):

$$n: \frac{N.Z^2.P(1-P)}{N.E^2 + Z^2.P(1-P)}$$

n = banyaknya sampel

N = jumlah populasi (berjumlah 6.295.486 orang)

Z = nilai standar sesuai dengan tingkat kepercayaan (dalam hal ini bernilai 1,96 pada tingkat kepercayaan 95 %)

E = error yaitu tingkat kesalahan yang ditentukan (dalam hal ini penulis menetapkan 10 % atau 0,1)

P = proporsi atau presentasi yang mempunyai karakteristik tertentu (dalam hal ini penulis menetapkan 50 % atau 0.50) Berdasarkan rumus tersebut ditetapkan jumlah sampel (n) sebagai berikut:

$$n: \frac{6.295.486.1,96^2.0,5(1-0,5)}{6.295.486.0,1^2 + 1,96^2.0,5(1-0,5)}$$

$$n: \frac{6.295.486.3,84.0,25}{6.295.486.0,01 + 3,84.0,25}$$

$$n: \frac{6.043.666,56}{62.954,86 + 0,96}$$

$$n: \frac{6.043.666,56}{62.955,82}$$

n: 95,998 (dibulatkan menjadi 96)

Dari perhitungan sampel dengan rumus Frank Lynch diperoleh 95,9997 , oleh karena itu dalam penelitian ini jumlah responden adalah 96 orang.

1.6.1.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional area random sampling. Dimana sampel yang diambil setiap Kabupaten/Kota yang

memiliki perolehan suara tertinggi dari pasangan Ahmad Syaikhu dan Sudrajat . Hal ini dilakukan karena jumlah populasi pemilih tetap setiap Kabupaten/Kota tidak sama. Data jumlah penduduk pemilih tetap provinsi Jawa Barat untuk setiap Kabupaten/Kota yang memiliki suara tertinggi dari pasangan Ahmad Syaikhu dan Sudrajat sebagai berikut:

Tabel I-3 Perolehan suara pasangan Asyik

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	Perolehan suara pasangan Ahmad Syaikhu dan Sudrajat
1	Kabupaten Bogor	2.239.872	801.322
2	Kabupaten Bekasi	1.153.134	489.097
3	Kabupaten Bandung	1.783.923	458.633
4	Kabupaten Sukabumi	1.118.557	395.318
	Total	6.295.486	2.144.370

Sumber: KPU Jawa barat

Teknik pengambilan sampel berdasarkan data tersebut akan menggunakan rumus berikut:

$$n_h = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

N_h = Banyaknya sampel yang dibutuhkan dari setiap dusun

n = Jumlah sampel yang mewakili populasi

N_i = Banyak sub populasi dari sekelompok

N = Jumlah keseluruhan populasi

Berdasarkan rumus diatas, maka banyaknya sampel yang dibutuhkan dari setiap Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bogor : $\frac{2.239.872}{6.295.486} \times 96 = 34,155$ dibulatkan menjadi 34
2. Kabupaten Bekasi : $\frac{1.153.134}{6.295.486} \times 96 = 17,584$ dibulatkan menjadi 18
3. Kabupaten Bandung : $\frac{1.783.923}{6.295.486} \times 96 = 27,203$ dibulatkan menjadi 27
4. Kabupaten Sukabumi : $\frac{1.118.557}{6.295.486} \times 96 = 17,056$ dibulatkan menjadi 17

Jadi total sampel seluruhnya adalah 96 responden.

Proses penyebaran sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subyek peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel. Kriteria dan pertimbangan yang dilakukan dalam memilih sampel agar lebih terbukti perolehan informasinya, yaitu:

- 1). Subyek mempunyai hak pilih dan menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada Jawa Barat 2018
- 2). Subyek tahu dengan isu tagar #2019GantiPresiden
- 3) Subyek mempunyai cukup waktu atau kesempatan untuk diminta informasi

1.6.1.7 Sumber Data

1.6.1.7.1 Jenis Data

Dalam perolehan data, terdapat berbagai sumber yang bisa diakses oleh peneliti untuk menghasilkan informasi. Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yang disebut data Sekunder dan data Primer (Istijanto,2005) Dalam penelitian ini akan menggunakan 2 jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa pernyataan yang diangkakan misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Suatu pernyataan/pertanyaan yang memerlukan alternatif jawaban, di mana masing-masing : sangat setuju diberi angka 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan tidak setuju 1 (Sugiyono dalam Fatkhullah et al., 2013:12). Data kualitatif dalam penelitian berupa data pertanyaan yang didapatkan dari narasumber dan dokumentasi lapangan.

1.6.1.7.2 Sumber Data

Data diperoleh dari sumber data primer dan dan data sekunder.

a.Data Primer (data yang langsung berasal dari sumbernya)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari narasumber secara langsung dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada sampel yang telah ditentukan.

b.Data Sekunder (data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa data sekunder berupa buku, jurnal, dan informasi dari web di internet yang berhubungan dengan fokus dari topik yang diteliti

1.6.1.8 Skala Pengukuran

Skala pengukuran variabel terdiri dari nominal, ordinal, interval dan rasio. Dalam penelitian ini akan menggunakan skala pengukuran ordinal, skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Untuk mendapatkan data berskala ordinal, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner hendaknya menggunakan opsi jawaban model skala likert. Pada umumnya opsi jawaban terdiri atas 5 (lima) opsi sebagai berikut (Sarwono.J 2006;108) :

- 1.sangat setuju
- 2.cukup setuju
- 3.netral
- 4.tidak setuju
- 5.sangat tidak setuju

Contohnya dalam penelitian ini terdapat variabel perilaku pemilih, nantinya akan diberikan pertanyaan mengenai faktor masyarakat memilih calon, dari sangat setuju ke sangat tidak setuju menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan. Untuk kepentingan pengolahan data di SPSS maka opsi-opsi yang berupa teks tersebut harus dikuantifikasi (diberi simbol angka) sebagai berikut :

- 1.sangat setuju diberi nilai 5
- 2.cukup setuju diberi nilai 4
- 3.netral diberi nilai 3
- 4.tidak setuju diberi nilai 2
- 5.sangat tidak setuju diberi nilai 1

Angka 1 sampai 5 tersebut hanya merupakan symbol atau bukan angka sebenarnya dan bersifat relatif.

1.6.1.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dan dokumentasi.

a.Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015:199).Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah

yang luas. Dalam penelitian ini akan menggunakan kuesioner tertutup, yaitu jawaban didalam pertanyaan sudah ditentukan oleh peneliti.

b.Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini akan menggunakan dokumen dokumen terdahulu dari buku, jurnal, atau web mengenai hal yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

1.6.1.10 Instrumen Penelitian

Alat pengumpul data meliputi kuesioner (tertutup, semi tertutup), pedoman wawancara, panduan observasi dan alat pengumpul data lainnya. Dalam penelitian ini akan menggunakan alat kuesioner tertutup. Item Kuesioner tertutup perlu diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya.

1.6.1.11 Teknik Analisis

Menurut Sugiyono, teknik penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian dengan landaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Umumnya teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen metode penelitian kuantitatif, analisa data yang bersifat kuantitatif atau statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan alat bantu yaitu SPSS, SPSS adalah program aplikasi yang memiliki analisis data statistik yang cukup tinggi. SPSS memiliki sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah

mengoprasikan dan memahaminya (Machali Imam,2015;1). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis sederhana (*Bivariate Correlation*) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Untuk melihat hubungan antara X1 dengan Y dan X2 dengan Y maka akan digunakan korelasi bivariat, Korelasi bivariat atau sering disebut dengan korelasi sederhana adalah hubungan antara dua variabel yaitu antara variabel independen (X), dan variabel dependen (Y) (Machali Imam,2015;104).

1.6.1.12 Riset Lapangan

Penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan di lapangan, yang terkait dengan loncatan suara pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu dan sentiment anti jokowi di Jawa Barat. Data hasil temuan di lapangan akan diuraikan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada BAB ini yakni: Apakah kampanye #2019gantipresiden turut mempengaruhi dalam perolehan loncatan hasil suara pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu? Apa faktor sosial politik yang menjelaskan loncatan suara pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu ?

Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yakni penelitian kuantitatif dan kualitatif, dalam metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama dan metode kualitatif sebagai pendukung.

Penelitian Kuantitatif menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena sosial yang terjadi di pilkada Jawa Barat 2018 yang dimaksud disini ialah fenomena lonjakan suara pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Menurut Nazir (1988: 63) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional area random sampling. Dimana sampel yang diambil setiap Kabupaten/Kota yang memiliki perolehan suara tertinggi dari pasangan Ahmad Syaikhu dan Sudrajat . Hal ini dilakukan karena jumlah populasi pemilih tetap setiap Kabupaten/Kota tidak sama. Data jumlah penduduk pemilih tetap provinsi Jawa Barat untuk setiap Kabupaten/Kota yang memiliki suara tertinggi dari pasangan Ahmad Syaikhu dan Sudrajat sebagai berikut:

Tabel I-4 Perolehan suara tiap Kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	Perolehan suara pasangan Ahmad Syaikhu dan Sudrajat
1	Kabupaten Bogor	2.239.872	801.322

2	Kabupaten Bekasi	1.153.134	489.097
3	Kabupaten Bandung	1.783.923	458.633
4	Kabupaten Sukabumi	1.118.557	395.318
	Total	6.295.486	2.144.370

Sumber: KPU Jawa Barat

Data dari hasil penelitian ini didapat melalui sebar kuesioner yang telah dibagikan kepada 96 responden dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Bogor 34 responden
2. Kabupaten Bandung 27 responden
3. Kabupaten bekasi 18 responden
4. Kabupaten sukabumi 17 responden

Empat kabupaten diatas dipilih dikarenakan peroleh suara terbanyak pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu di Jawa Barat

Berikut list nama responden dari tiap Kota/Kabupatennya.

Tabel I-5 Responden tiap kota/kabuoaten

NO	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Sukabumi
----	--------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

1	Rizqia	Shifa Karima Hayati	M. Wahyu N. Ajie	Muhammad Faisal Yusuf Al Ayubi
2	Firman Fauzan	Al	Desy Sumardiyani	Candra Wibowo
3	Zahro	Desga Artikulasi	Muna Kamila	Mely Kartikasari
4	Alfiana Karimah	Hana	Azis Mufti	Puad
5	Suci mardiyani	Harmoni Shofa	Avinda Jihan Ardiani	Erin
6	Marin	Afif	Ria Diani	Fikri
7	Meutia Riski	Fauzil	Wiwi Rahayu	Deria Ramadayanti
8	Asri Fitria d	Andeska Purnama	Lie	Rijwan Munawan, S.I.P
9	Nurhalifah	Anwar Musthopa	Nadya Meidina	Muhammad Farhan Nugraha
10	Fatur	Nadia	Lussie	M Rasyid Farhan T
11	Hardiyanti NC	Ratu anggista aprilina	Inggid	Maya Amalia
12	Zuliah	Indah nirmala	Elza nur aziza	Hilda

13	Feni agustina	Annisa Rahmafillah	Ranti	Lia Tresna Dewi
14	Mutia	Shafira	Ita	Fauzia aprila
15	resy	Arif Hidayat	Hani	Hafiz athallah
16	Rechsa A	Muthi	Heni Widyastuti	Abrar falah
17	Solihat	Irma	Satrio	Aldila Natasya
18	Sri Sariyati Handayani	Ajeng i		Alfa Audie
19	Hasan	Sandy Fhian Hermawan		
20	Rini susanti	Cindy Rizalni		
21	Yuniarti	Ayu		
22	Rosasih	Muthia		
23	Ade sri mulyati	Widiyanti Nurlaela		
24	Amelia nurazizah	Cici Imelia		
25	Farnelia Abdullah	Larasati Aprilia		
26	Yusi fitri	Farhan Azhar Fuadi		

27	Chatra anggakara irandi	Azhar Ali		
28	Git			
29	Irfan Arya			
30	Nadira			
31	Ida			
32	M iqbal			
33	Fachri Alam			
34	Rima Rahmayanti			
	Total Responden	96		

Metode Penelitian Kualitatif sebagai metode pendukung peneliti ini. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian eksploratif. Arikunto (2006:7) menjelaskan penelitian eskploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mematakan suatu objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai

manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita.

Riset yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara kepada dua narasumber yakni Ibu Sari sundari, beliau merupakan bagian dari tim kampanye pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhul di Jawa Barat, masuk juga di struktur DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat sebagai ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) dan beliau juga sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat fraksi PKS, karena keterlibatan dalam tim kampanye pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhul, dan juga Struktural dari Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, menjadi alasan penulis untuk menjadikan Ibu Sari Sundari sebagai narasumber penelitian ini. Untuk narasumber yang kedua yakni Bapak Tomi, beliau merupakan bagian dari tim kampanye pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhul di daerah Kabupaten Bogor, dan masuk juga di struktur DPC Gerindra Kabupaten Bogor sebagai wakil sekretaris dan beliau juga sebagai tenaga ahli di DPRD Kabupaten Bogor, karena keterlibatan beliau di tim kampanye pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhul, dan juga beliau aktif di struktur partai Gerindra, di DPC Kabupaten Bogor, menjadi alasan penulis untuk menjadikan Pak Tomi sebagai narasumber di penelitian ini.

Alasan memilih memilih narasumber dari partai Gerindra dan PKS, dikarenakan keterlibatan dua partai tersebut dalam pengusungan Sudrajat dan Ahmad Syaikhul dan juga keterlibatan partai dalam tim kampanye, menjadi alasan penulis untuk menjadikan partai Gerindra dan PKS sebagai narasumber penelitian ini.

1.6.2 Kualitatif

Pendekatan metode Kualitatif digunakan untuk mengetahui alasan dan latar belakang lebih detil lagi dari pemilih pasangan Ahmad Syaikh dan Sudrajat yang disebabkan dari kampanye anti Jokowi/Tagar #2019GantiPresiden

1.6.2.1 Desain Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian eksploratif. Arikunto (2006:7) menjelaskan penelitian eskploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mematakan suatu objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita. Peneliti mengungkapkan penelitian eksploratif ini secara kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu atau fenomena sosial yang terjadi di pilkada Jawa Barat 2018 yang dimaksud disini ialah fenomena lonjakan suara pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikh.

1.6.2.2 Situs Penelitian

Tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat, dan untuk daerah yang diteliti ialah daerah yang memiliki jumlah pemilih pasangan Sudrajat dan Ahamd Syaikh terbanyak diJawa Barat yaitu

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Sukabumi dan Kabupaten Bandung sebagai tempat terlaksananya Pilkada Jawa Barat 2018

1.6.2.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto tahun (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya ialah masyarakat pemilih yang memilih pasangan Ahmad Syaikhu dan Sudrajat yang disebabkan oleh kampanye anti Jokowi/Tagar #2019GantiPresiden

1.6.2.4 Jenis Data

Jenis-jenis data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data berupa teks-teks yang merupakan data hasil interview dengan Subjek Penelitian

1.6.2.5 Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua data pendukung yaitu data secara primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat di lapangan sebagai hasil wawancara antara penulis dengan narasumber mengenai fenomena yang ada. Dalam melakukan input data primer, terlebih dahulu penulis akan akan membuat identifikasi terhadap sumber pengumpulan data. Kategorisasi pengumpulan data dibagi atas aktor-aktor yang terlibat dalam masalah Pilkada Jawa Barat. Kategorisasi tersebut meliputi: 1. Masyarakat Jawa Barat tiap kabupaten 2.

Timses Pasangan Ahmad Sudrajat – Syaikhu 3. Bawaslu Jawa Barat. Sedangkan data sekunder merupakan data tambahan sebagai bentuk elaborasi atas data primer dan sebagai acuan melihat setting yang terjadi dalam proses-proses Pilkada Jawa Barat.

1.6.2.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini membutuhkan berbagai teknik pengumpulan data yang antara lain adalah:

1. Metode kuisisioner

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara kuantitatif. Yaitu data-data yang berupa pertanyaan dalam bentuk kuisisioner yang diharapkan dapat memberikan petunjuk. Petunjuk mengenai bagaimana masalah yang terjadi dan informasi guna memecahkan masalah, sehingga memberikan solusi baik itu untuk diri sendiri agar dapat bergerak untuk melakukan sesuatu atau dapat digunakan untuk menganalisis tentang perkembangan dan pergerakan politik identitas di dalam ruang demokarsi. Akan tetapi metode pengumpulan data dengan cara ini juga syarat akan kelemahan. Kelemahan yang ada adalah responden yang dipilih oleh peneliti sangat mungkin memberikan data kepada peneliti tidak sesuai dengan validitas dari fenomena. Data yang disampaikan oleh narasumber sangat mungkin diberikan data palsu yang tidak sesuai dengan fenomena. Selain hal tersebut yang menjadi tantangan dalam metode ini adalah melihat respon yang diberikan oleh narasumber karena persoalan yang diteliti bersifat sensitif dan sangat mungkin terjadi perasaan tersinggung.

2. Diskusi Kelompok yang terarah

Teknik pengumpulan data ini menjadi implementasi dari teknik observasi. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan yang disampaikan oleh aktor-aktor ataupun pihak lain yang bersangkutan. Informasi didapatkan melalui pihak yang memang benar-benar menjadi pelaku ataupun dari pihak-pihak yang melihat secara langsung akan kejadian dari sebuah fenomena tersebut. Teknik ini menjadi alternatif ketika ingin menemukan informasi yang lebih mendalam tanpa melalui pihak yang bersangkutan dan juga mengungkapkan fakta-fakta baru dari permasalahan tersebut. Akan tetapi teknik ini juga ada kendala yaitu ketika pihak-pihak yang ditemui oleh penulis tidak mengetahui secara gamblang mengenai sebuah peristiwa yang terjadi. Dari teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang telah disampaikan, yang menjadi poin-poin utama yang harus menjadi pelajaran adalah setiap peneliti harus memiliki kecermatan, kepekaan, ketelitian, dan juga rasa sopan santun yang harus dijunjung tinggi ketika sedang melakukan eksplorasi untuk mendapatkan data dengan teknik-teknik yang digunakan diatas.

1.6.2.7 Analisis dan Interpretasi Data

Pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1.Editing adalah kegiatan meneliti kembali terhadap data yang didapatkan dari hasil penelitian sehingga kekurangan bisa dihindari. Editing ini bertujuan untuk mengecek kesempurnan, keseragaman, dan ketepatan dari data yang telah

terkumpul. Sehingga dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan dari wawancara dan observasi diteliti kembali sehingga tidak terjadi kesalahan.

2. Triangulasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data yang didapat dengan memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengetahuan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Data yang didapatakna dari wawancara dan juga observasi dibandingkan kembali dengan data yang diperoleh dari studi pustaka, yang akan menguatkan hasil penelitian dan memudahkan analisis nantinya. perpanjangan waktu wawancara dan obeservasi sehingga dengan cara ini bisa diperoleh data tambahan yang berguna bagi analisis data nantinya